

KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK SUROBOYO BUS BERBAYAR SAMPAH BOTOL PLASTIK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh :

ARINI SAHADAH

NIM : I71216037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DESEMBER 2019

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ARINI SAHADAH

NIM : I71216037

Program Studi : ILMU POLITIK

Judul Skripsi : Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar
Sampah Botol Plastik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 17 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Arini Sahadah
NIM. I71216037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : ARINI SAHADAH

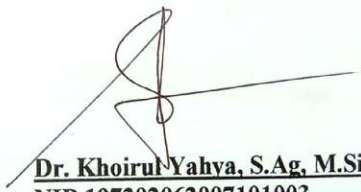
NIM : I71216037

Program Studi : ILMU POLITIK

Yang berjudul: **KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK SUROBOYO BUS BERBAYAR SAMPAH BOTOL PLASTIK**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 18 September 2019

Pembimbing



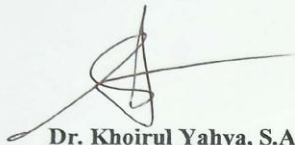
Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP 197202062007101003

PENGESAHAN

Skripsi oleh Arini Sahadah “KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK SUROBOYO BUS BERBAYAR SAMPAH BOTOL PLASTIK” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Desember 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I


Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji II


Moh. Ilyas Rolis, S.Ag, M.Si
NIP . 197704182011011007

Penguji III


Hj. Siti Azizah, S.Ag, M.Si
NIP . 197703012007102005

Penguji IV


Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

Surabaya, 24 Desember 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Ach. Muzakki, M.Ag, Grad, Dip, SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Arini Sahadah**
NIM : **I71216037**
Fakultas/Jurusan : **Fisip/Ilmu Politik**
E-mail address : **arinarini164@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : **KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK SUROBOYO BUS BERBAYAR
SAMPAH BOTOL PLASTIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2019

Penulis

(Arini Sahadah)

ABSTRAK

Arini Sahadah, 2019, *Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar Sampah Botol Plastik*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berawal dari adanya kebijakan transportasi publik suroboyo bus yang membayar dengan sampah botol plastik di Kota Surabaya. Ada dua rumusan masalah terkait penelitian ini : 1). Bagaimana Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus, 2). Bagaimana Perubahan Pengelolaan Sampah Botol Plastik Sejak Adanya Suroboyo Bus. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan suroboyo bus dan perubahan pengelolaan sampah botol plastik. Penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan memakai Teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik suroboyo bus belum dapat dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang ingin membayar dengan uang tidak dengan sampah botol plastik, sampah botol plastik yang digunakan untuk membayar suroboyo bus juga tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam perwali, masih ada masyarakat yang menyalahgunakan tiket suroboyo bus juga kurangnya sosialisasi pihak pelaksana terhadap masyarakat tentang suroboyo bus. Kemudian dalam pengelolaan sampah botol plastik di kota Surabaya mengalami perubahan yaitu dengan berkurangnya sampah botol plastik yang ada dijalanan, tidak seperti dulu sebelum adanya suroboyo bus yang masih berserakan di setiap jalanan. Sebelum dikeluarkan perwali suroboyo bus tentang kontribusi sampah, botol plastik tersebut di simpan di bank-bank sampah dan juga di rumah kompos yang ada di Surabaya. Setelah dikeluarkan perwali pihak Dinas Kebersihan ditunjuk untuk mengelola sampah botol plastik. Selanjutnya sampah botol plastik tersebut dilakukan pemilahan untuk membedakan ukuran botol, dan warna botol.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Transportasi Publik, Suroboyo Bus

ABSTRACT

Arini Sahadah, 2019. Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar Sampah Botol Plastik. Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

This research begins with the public transportation policy suroboyo bus that pay for plastic bottle bins in the city of Surabaya. There are two problem formulations related to this research. 1). How is the implementation of the suroboyo bus transportation policy. 2). How has management of plastic bottle waste changed since the suroboyo bus. To answer these problems researchers used descriptive qualitative methods. In the aim of this research is to find out how the implementation of the suroboyo bus policy and changes in the management of plastic bottle bins. This qualitative research used data collection techniques such as observation. The theory used uses the theory of Van Metter and Van Horn policy implementation.

The results of this study indicate that the implementation of the suroboyo bus public transportation policy cannot yet be said to be successful because many people want to pay with money not with plastic bottle bins. Plastic bottle bins used to pay for suroboyo bus are also not in accordance with what is stipulated in the guardian, and there are still people who abuse suroboyo bus tickets as well as the lack of socialization of the implementing party to the public about suroboyo bus. Then in the management of plastic bottle waste in the city of Surabaya has changed, namely the reduction of plastic bottle waste in the streets, not like before suroboyo bus are still scattered on every street. Before the suroboyo bus legal basis was issued regarding the contribution of rubbish, the plastic bottles were stored in the garbage banks and also in the compost house in Surabaya. After being issued the basis the cleaning service is appointed to manage the plastic bottle bins. Then the plastic bottle trash is selected to distinguish the size and color of the bottle.

Keywords : Policy implementation, Public transportation, Suroboyo bus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Teknik Penentuan Informan	28
D. Tahap-tahap Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk 3,095,026 jiwa dan luas wilayah 326,36 km², dengan ekonomi yang dimilikinya saat ini menjadikan Kota Surabaya mempunyai peran yang cukup strategis dan perlu mempertimbang dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu terutama dalam hal kebijakan transportasi publik. Karena Surabaya merupakan kota metropolitan yang sangat membutuhkan transportasi publik untuk mengatsi permasalahan yang ada di Kota Surabaya terutama dalam hal kemacetan.¹

Bagi masyarakat di Kota Surabaya adalah bus. Yang memiliki kapasitas untuk mengangkut penumpang yang cukup banyak dibandingkan dengan transportasi yang lainnya. Sampai saat ini bus merupakan transportasi yang menjadi pilihan di Kota Surabaya, karena harganya yang cukup murah dan efisien. Pada tahun 2018 walikota Surabaya mengeluarkan bus yang membayarnya tidak memakai uang melainkan membayar dengan limbah botol plastik. Karena sampah botol plastik yang ada di Kota Surabaya cukup banyak

¹ Zuhri Muhis dan Wahyu Herijanto, “ *Manajemen Lalu Lintas Akibat Trem di Jalan Raya Darmo*” Jurnal Teknik Pornits Vol. 3 No. 1 (2014) ISSN : 2337 :3539(2301-9271)

David Easton mengatakan bahwa kebijakan pemerintah itu sebagai pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Sementara menurut Laswell melihat kebijakan yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama.³ Sedangkan menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan yaitu sebagai prinsip-prinsip yang mengatur suatu tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu, dengan demikian kebijakan dapat dinyatakan bahwa kebijakan yaitu suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.⁴ Maka dari itu, kemudian pemerintah mengeluarkan dasar hukum yaitu Peraturan Wali Kota Surabaya No 67 Tahun 2018 tentang kontribusi sampah

⁴ Fadel Machmud, Marten KimbL DKK, *Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Volume 2 No. 2 Tahun 2017, ISSN : 2337-5736

Kondisi terminal-terminal di Surabaya mulai sepi dan cenderung ditinggalkan penumpang bisa terjadi karena banyak hal dan tidak semata-mata disebabkan karena kehadiran taksi online atau Suroboyo bus, di sisi lain perlunya diadakan peremajaan angkutan umum. Sehingga masyarakat semakin nyaman menggunakan angkutan umum di terminal. Jika kondisi fisik angkutan tidak diperhatikan, maka penumpang tidak nyaman. Mereka pindah ke transportasi online dan Suroboyo Bus. Sopir lyn di Surabaya sudah pernah diajak Dishub untuk bergabung dalam satu wada koperasi. Sehingga, lyn atau bus tidak mengejar penumpang. Tetapi sistemnya by the service atau pelayanan berdasarkan jam. Jika dikelola sesuai by the service, artinya bus atau angkutan tidak lagi menunggu jumlah penumpang (penuh). Jadi jarak antara satu lyn atau bus dengan lyn atau bus lain diatur. Angkutan ini dalam waktu tertentu harus meninggalkan lokasi meski tidak ada penumpang⁶. Jadi kalau masih seperti ini masyarakat lebih memilih untuk naik Suroboyo Bus ketimbang angkutan umum, disisi lain kinerja transportasi publik suroboyo bus juga perlu untuk diperhatikan oleh penggunanya. Kinerja dikatakan sukses jika tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik, kinerja harus

⁶ <http://www.surya.co.id>, di akses tanggal 21-september-2019 pukul 09:17 wib

Berdasarkan analisa data sederhana ini menjadi alasan yang menarik bagi peneliti untuk menganalisa lebih lanjut dan menjadi Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar Sampah Botol Plastik”**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti angkat dalam penelitian ini adalah:

- ### C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus.

Dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan tambahan dalam penelitian lebih lanjut tentang kebijakan transportasi publik.

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu konsep secara jelas dan singkat, maka konsep tersebut sebagai dasar penelitian adalah :

Menurut Carl J. Federick yang dikutip oleh Leo Agustino⁷ menjelaskan bahwa Kebijakan merupakan serangkaian hal kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan baik oleh individu, kelompok maupun pemerintah dalam sebuah lingkup lingkungan tertentu dimana terdapat faktor pendukung serta penghambat dalam menjalankan suatu kebijakan guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah di rencanakan.

Dalam hal kebijakan harus mengikutsertakan perilaku dengan memiliki rancangan guna untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan kunci dari sebuah kebijakan. Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan guna untuk menggapai tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik yang disengaja maupun disengaja oleh seseorang,

8

Definisi kebijaksanaan membutuhkan peninjauan, menurut James E Anderson yang dikutip oleh Islamy, mengatakan bahwa kebijakan merupakan *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* yang dapat diartikan sekumpulan kegiatan dengan memiliki tujuan yang diiringi dan dikakukan oleh seorang pelaksana atau sekumpulan pelaksana untuk menyelesaikan suatu problematika.⁸

Implementasi dapat dilakukan setelah sebuah kebijakan sudah diterapkan, dalam suatu proses pembuat kebijakan merupakan aktivitas dalam menjalankan sebuah kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat untuk membawa hasil yang sudah direncanakan Menurut Hanifah Harsono⁹ dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik berpendapat bahwa implementasi yaitu sebuah proses untuk menjalankan kebijakan menjadi suatu tindakan kebijakan dari sebuah politik ke dalam administrasi. Pengembangan yang menjadi dalam sebuah kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program yang telah ada sebelumnya.

⁹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung : PT Mutiara Sumber Widya, 2002) hal 67

Menurut Grindle yang dikutip oleh Winarno, mengungkapkan pemikirannya tentang implementasi ia mengatakan peran implementasi yakni membuat suatu keterkaitan yang dapat menyederhanakan suatu tujuan dari kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan untuk kegiatan Pemerintah.

berbentuk undang-undang maupun berbentuk keputusan-keputusan eksekutif.

Lazimnya, keputusan ini terus menggali masalah-masalah yang diselesaikan secara jelas dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau menata implementasinya. Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan diatas, maka implementasi kebijakan dimaknai sebagai pelaksana kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat baik dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah.

Lazimnya, keputusan ini terus menggali masalah-masalah diselesaikan secara jelas dengan tujuan dan sasaran yang Dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau men implementasinya. Berdasarkan rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan diatas, maka implementasi ke dimaknai sebagai pelaksana kegiatan/aktifitas mengacu pa pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifi dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat ba dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi

sarana dan prasarana bagi manusia atau suatu hal yang akibat adanya kegiatan yang ada diperkotaan. Dengan tertera diatas bahwa peran yang pertama lebih sering perencanaan pengembangan daerah untuk dapat terus daerahnya sesuai dengan rencana. Misalnya disu dikembangkan sarana transportasi untuk menunjang masyarakat yang bekerja diwilayah lain, maka sarana berdampak penting bagi masyarakat untuk aksesibilitas tersebut untuk menunjang perekonomian masyarakat.¹²

5. Sampah Botol Plastik

5. Sampah Botol Plastik

Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan dengan waktu yang cukup singkat, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Saat ini sampah plastik menjadi hal yang besar di dunia termasuk di Negara Indonesia. Penyebab sampah plastik dimulai kita sendiri yang sadar akan kebersihan lingkungan ataupun masyarakat, karena banyak dijumpai semua yang digunakan dalam menggunakan

¹¹ Soesilo, Nining I. (1999). *Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota*. Jakarta. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

¹² Tamin, Ofyar Z. (1997:4-5). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung, Penerbit ITB

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didapat dari berbagai sumber penelitian terdahulu untuk bahan referensi terhadap penelitian yang akan dikembangkan. Berikut ini adalah berbagai persoalan karya orang lain yang hampir serupa yaitu :

No.	Penelitian yang sudah dilakukan
1.	<p>Achmad Risa Mediansyah, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP) Vol 3 No 1 Juni. ISSN:2460-6162, E-ISSN:2527-6476.</p> <p>Dengan judul “Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi di Kota Makassar” menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisis biaya transaksi transportasi di kota Makassar dalam hal constraints informal, peraturan formal dan penegak keduanya, terus melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur terutama sarana dan prasarana jalan yang tidak mendukung dengan pertumbuhan sarana transportasi serta untuk mengurangi masalah transportasi di Indonesia khususnya dikota Makassar yaitu untuk memperbaiki sarana transportasi Penelitian ini dilakukan di forum lalu lintas dan angkutan</p>

Kasus : BRT MAMMINASATA)“Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelayanan transportasi studi kasus BRT (Bus Rapit Transid) Mamminasata tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. BRT Mamminasata adalah sebuah upaya pemerintah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi darat di kawasan perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) dengan berbasis Transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT), berorientasi pada pelayanan yang aman, lancar nyaman, berkelanjutan dan inovatif. Kualitas pelayanan transportasi pada BRT Mamminasata sangat menentukan keberhasilan upaya yang telah dihadirkan oleh pemerintah untuk melalui pelayanan ini. Salah satu dampak yang diharapkan dari layanan ini ialah dapat mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sehingga jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi dapat ditekan. Jadi Fokus penelitian ini adalah lebih ke pelayanan transportasi pada studi kasus BRT Mamminasata belum berjalan secara efektif.¹⁵

Yang menjadi kesamaan dengan penueliti saat ini adalah sama-sama

¹⁵ Nabilah Ulfah Dewi, Skripsi, “*Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Kasus: BRT Mamminasata)*”. Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2017.

	<p>meneliti tentang program bus. Perbedaannya yang di bahas disini mengenai pelayanan bus rapid transit. Sedangkan yang peneliti lakukan yaitu tentang suroboyo bus Selain itu, perbedaan dari penelitian ini lebih membahas ke pelayananan transportasinya sedangkan sripsi yang peneliti buat lebih mengarah pada kebijakannya transportasi publik suroboyo bus membayar sampah botol plastik yang lebih memfokuskan terhadap kinerja kebijakan transportasi publik dan perubahan pengelolaan sampah botol plastik sejak adanya suroboyo bus.</p>
4.	<p>Rony Bachtiar Firmansyah, Skripsi mahasiswa prodi Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019 dengan judul “ Inovasi Kebijakan Transportasi Publik Studi Kasus Program Suroboyo Bus Membayar dengan Limbah Plastik “Penelitian ini membahas tentang Inovasi Kebijakan Transportasi Publik Studi Kasus Program Suroboyo Bus Membayar dengan Limbah Botol Plastik. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan sebagai sumber utama. Diketahui bahwa lahirnya kebijakan ini karena menciptakan transportasi yang nyaman dan itu bentuk dari pemerinntah kota Surabaya untuk memberikan transportasi yang layak bagi masyarakatnya. Desainnya juga yang meniru dengan bus yang ada di</p>

4.	<p>Rony Bachtiar Firmansyah, Skripsi mahasiswa prodi Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019 dengan judul “ Inovasi Kebijakan Transportasi Publik Studi Kasus Program Suroboyo Bus Membayar dengan Limbah Plastik “Penelitian ini membahas tentang Inovasi Kebijakan Transportasi Publik Studi Kasus Program Suroboyo Bus Membayar dengan Limbah Botol Plastik. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan sebagai sumber utama. Diketahui bahwa lahirnya kebijakan ini karena menciptakan transportasi yang nyaman dan itu bentuk dari pemerinintah kota Surabaya untuk memberikan transportasi yang layak bagi masyarakatnya. Desainnya juga yang meniru dengan bus yang ada di</p>
----	---

Persamaan dengan penelitian yang sudah penulis buat adalah sama-sama meneliti tentang evaluasi transportasi publik. Penelitian dari jurnal ini mengenai transjakarta sebagai angkutan umum sedangkan penelitian yang dibuat dalam skripsi ini mengenai transportasi suroboyo bus yang khusus membayar dengan sampah plastik. Perbedaan dari penelitian penulis adalah lebih fokus dalam mendeskripsikan bagaimana transjakarta sebagai program transportasi yang sudah sesuai dengan

[illegible]

Tidak hanya Kebijakan yang bersifat monopoli identitas penduduk, yang mempunyai derajat politik seperti pertahanan dan keamanan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan seperti penanggulangan kemiskinan sebaliknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dan pembangunan berskala kecil dan menengah yang tidak strategis diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Tepat target

Apakah target yang dicari sudah memenuhi kriteria direncanakan, dan apakah tidak saling bertentangan

Apakah target yang dicari sudah memenuhi kriteria yang sudah direncanakan, dan apakah tidak saling bertentangan dengan kebijakan. Kesiapan bukanlah arti secara alami, namun apakah juga kondisi target dalam keadaan siap saat diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

Apakah target yang dicari sudah memenuhi kriteria
direncanakan, dan apakah tidak saling bertenta

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi dua yang paling menentukan yaitu lingkungan pelaksana kebijakan dan lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi dua
menentukan yaitu lingkungan pelaksana kebijakan d

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi dua yang paling menentukan yaitu lingkungan pelaksana kebijakan dan lingkungan

Dalam tahap implementasi kebijakan ada 3 hal tepat

- a) Policy acceptance (Penerima kebijakan) memahami kebijakan sebagai tugas dilaksanakan.
- b) Policy adaption(adopsi kebijakan), pemerintah kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan
- c) Strategis readiness (kesiapan strategi), pemerintah melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan siap menjadi pelaksana.

Kedua, Pemikiran akademis pertama dikembangkan oleh dua pakar kebijakan Donal Van Metter dan Carl Van

Dalam tahap implementasi kebijakan ada 3 hal tepat proses yaitu :

- dua, Pemikiran akademis pertama dikembangkan oleh para pakar kebijakan Donal Van Metter dan Carl

mereka yang disebut dengan istilah *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Van Meter dan Horn di teori mereka berasal dari suatu pendapat bahwa perbedaan dalam suatu proses implementasi akan dipengaruhi oleh kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari hal ini, kemudian menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antar isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model ko-

2. Sumber-sumber kebijakan.

Suatu kebijakan seharusnya perlu didukung oleh sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia. Sumber-sumber kebijakan juga diperlukan untuk mendukung kelancaran suatu implementasi kebijakan yang efektif.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.

Karakteristik atau ciri-ciri badan pelaksana akan dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan yang didalamnya menyangkut suatu norma atau hubungan dalam suatu badan eksekutif yang dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Implementasi kebijakan juga memberikan dukungan pada kelompok kepentingan yang dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana kelompok-kelompok kepentingan mampu memberikan dukungan bagi para implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan ada yang mempunyai sifat mendukung maupun menolak suatu kebijakan yaitu terutama elite polit.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Dalam suatu komunikasi baik antar sesama maupun organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan saling mengkomunikasikan dengan yang lain untuk membicarakan terkait dengan tujuan

yang diinginkan.

5. Sikap para pelaksana

Dalam hal ini merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh para pelaksana antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya koordinasi maka permasalahan yang timbul akan semakin banyak. Dengan adanya saling koordinasi setiap hari maka akan semakin sedikit permasalahan yang ada. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

6. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

Keadaan sosial, ekonomi maupun politik merupakan faktor yang dapat mendukung berjalannya suatu implementasi.

6. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

Keadaan sosial, ekonomi maupun politik merupakan suatu hal yang dapat mendukung berjalannya suatu implementasi kebijakan dan saling mempengaruhi kondisi lingkungan mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilaksanakan.¹⁹

¹⁹ Abdul Aziz dan Humaidi, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Universitas Sumatera Vol 3, No. 1, Juni 2013. Hal 5-6

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul “ Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar Sampah Botol Plastik” pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih relevan dimana komponen tersebut menjelaskan kejadian berdasarkan fenomena kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus berbayar sampah botol plastik. Dengan ini peneliti ingin mengungkapkan fakta yang terkait dengan jalannya kineja kebijakan dan perubahan pengelolaan sampah botol plastik sejak adanya suroboyo bus di Kota Surabaya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memecahkan atau mendapat solusi dari suatu informan butuh yang namanya tempat untuk penelitian. **Pertama**, yaitu bertempat di Dinas Perhubungan Bagian Pengelolaan Unit Suroboyo Bus yang berada di Jalan Letjen Sutoyo, Bungurasih, Waru Sidoarjo Jawa Timur. Tujuannya untuk melakukan interview dengan bagian pengelolaan ketua unit Suroboyo Bus.

Kedua, yaitu bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 18-22, Embong Kaliasin, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mencari informasi terkait terna yang diangkat oleh peneliti yaitu dengan komisi C bagian transportasi publik.

Ketiga, yaitu bertempat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau yang berada di Jalan Raya Menur No. 31A Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mencari informasi atau data terkait tema yang diambil oleh peneliti yaitu Dinas Kebersihan sebagai pihak pengelola sampah botol plastik.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan, yaitu mulai dari bulan Oktober s/d Desember 2019.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu dimana teknik dalam pemilihan sampel sesuai dengan tujuan tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi sesuai dengan tema yang diambil. Oleh karena itu dalam penelitian ini penentuan informan digunakan untuk mengetahui suatu keadaan yang menyangkut dengan suatu permasalahan. Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar Sampah Botol Plastik dengan ini peneliti berharap informan yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Informan tersebut dapat dilihat pada

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan Penelitian

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Penelitian

Daftar Nama Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Jabatan
1.	Pak Franki	Kepala Dishub Unit Suroboyo
2.	Bapak Buchori Imron	Anggota DPRD Kota Suroboyo
3.	Pak Eri	Kepala DKRTH Suroboyo
4.	Nadia	Pengguna Suroboyo
5.	Reza Oktavian	Pengguna Suroboyo
6.	Ana	Pengguna Suroboyo

D. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap penelitian pra lapangan, peneliti harus mencari informasi tentang Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar Sampah Botol Plastik. Sebagai akses awal data peneliti menggali informasi kepada informan terkait, kemudian menyusunnya menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat proposal penelitian, yang mana dalam tahapan menyusun rancangan tpenelitian kualitatif berisi: Latar belakang masalah, Kajian kepustakaan, pengumpulan data teori yang digunakan.²¹

b. Memilih Lapangan Penelitian

Cara yang harus dilakukan dalam memilih lapangan penelitian yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan yang ingin diteliti untuk dapat melihat apakah lapangan penelitian tersebut sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Bisa saja peneliti juga mempertimbangkan geografis seperti waktu, biaya dan tenaga ketika melakukan penelitian di kantor Dishub Kota Surabaya.

²¹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung PT. Remaja, 2006) hal 86.

c. Menyusun Laporan

Laporan harus disusun sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil yang didapatkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling sederhana dalam suatu penelitian, karena tujuan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Dari tujuan penelitian tersebut bahwasanya tidak akan mendapatkan data yang standar jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data.²³ Teknik pengumpulan data digunakan untuk mencari tau fakta yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. Data yang didapatkan seorang peneliti bisa melalui rekaman wawancara, dokumentasi foto serta catatan yang digunakan untuk wawancara dengan informan.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik analisis data dengan cara triangulasi, yaitu saling menghubungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Dan Triangulasi mencakup sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam suatu observasi ada beberapa pihak yang terlibat yaitu aktor, tempat, kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Observasi

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 60

Teknik yang dilakukan dalam suatu observasi cara mengumpulkan data yang didapatkan melalui apa sehari-hari terhadap kebijakan transportasi publik Ssroboyo bus serta perubahan pengelolaan sampah botol plastik. Selain itu penulis juga mengamati terhadap kinerja dalam kebijakan transportasi suroboyo bus yang membayar sampah botol plastik.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan seorang peneliti dalam penelitian yaitu untuk menemukan permasalahan dengan pihak yang diajak wawancara untuk

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan penelitian yaitu untuk menemukan permasalahan-permasalahan dengan pihak yang diajak wawancara untuk diminta pendapat/argumen tentang kebijakan transportasi publik suroboyo bus berbayar sampah botol plastik juga untuk mengutarakan ide-idenya. Tujuan wawancara dengan pihak tersebut agar data yang di dapatkan peneliti tidak melebar dari topik yang ditentukan dan hanya fokus ke judul yang diteliti oleh peneliti.

²⁴ Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal 66

dalam data serta untuk mengukur layak atau tidak
tersebut yaitu dengan cara mendokumentasikan
digunakan guna untuk menjawab permasalahan
dicari dalam dokumen maupun pustakaan. Pen
dokumentasi untuk memperoleh data tentang ha
yang telah dilakukan guna mengetahui kinerja ke
publik Suroboyo Bus dan perubahan pengelo
plastik sejak adanya suroboyo bus yang berbayar s

tu berupa sekilas catatan tentang permasalahan-permasalahan

Untuk menganalisis

fakta yang didapatkan dilapangan, maka penulis penyajian data yakni gambaran umum Kota Surabaya penulis juga melengkapinya dengan profil Dinas Perhubungan Suroboyo Bus, dan Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau implementator dalam kebijakan ini.

3. *Conclution Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah dengan menarik kesimpulan. Belum dikatakan berhasil jika kesimpulan tidak ditemukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Jika di awal sudah ditemukan bukti-bukti yang sangat kuat

Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah dengan mencari kesimpulan. Belum dikatakan berhasil jika kesimpulan tidak ditemukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Jika di awal sudah ditemukan bukti-bukti yang sangat

Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah dengan mencari kesimpulan. Belum dikatakan berhasil jika kesimpulan tidak ditemukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Jika di awal sudah ditemukan bukti-bukti yang sangat

Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah dengan mencari kesimpulan. Belum dikatakan berhasil jika kesimpulan tidak ditemukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Jika di awal sudah ditemukan bukti-bukti yang sangat

Dalam penelitian ini, kesimpulan yang telah di tahap pemilahan data yang disajikan dengan mene bukti yang kuat berupa kebijakan transportasi publik berbayar sampah botol plastik serta hasil wawan dengan informan penelitian. Setelah mendapatkan o

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membaca referensi yang berasal dari buku, penelitian terdahulu maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

2. Triangulasi

[illegible]

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.²⁸

Melalui teknik Triangulasi Sumber, peneliti mengumpulkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengujian data dengan empat jenis profesi ini, yaitu Dinas Perhubungan Unit Suroboyo Bus, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terbuka Hijau, Komisi C DPRD Kota Surabaya dan Dinas Suroboyo Bus. Pengujian data dilakukan dengan metode

berbagai sumber data.²⁸

Melalui teknik Triangulasi Sumber, peneliti m yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam h melakukan pengujian data dengan empat jenis profesi in Dinas Perhubungan Unit Suroboyo Bus, Dinas Kebersih Terbuka Hijau, Komisi C DPRD Kota Surabaya d Suroboyo Bus. Pengujian data dilakukan dengan metoo

Suroboyo Bus. Pengujian data dilakukan dengan meto

dengan teknik berbeda. Disini peneliti menguji data dengan

²⁸ Ibid, hal 241

dikatakan empat informan kemudian dipastikan kembali melalui data-data yang relevan dan observasi di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika pembahasan

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Ibukota Jawa Timur yaitu Surabaya Kota Surabaya yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Secara topografi, sebagian besar wilayah yang ada di Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.²⁹

²⁹ www.surabaya.go.id (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 19:33 wib)

Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan sumber limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir terutama pada musim penghujan.

Arus lalu lintas di Surabaya kian ramai dan padat, bisa dijumpai pada jam-jam tertentu seperti pagi dan sore volume kendaraan pada ruas-ruas tertentu. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjelaskan peningkatan volume kendaraan dari luar kota yang keluar-masuk Surabaya. Tetapi, menurutnya infrastruktur yang sedang dalam proses perbaikan. Sehingga kemacetan bukan karena bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas, sebab bertambahnya jumlah kendaraan di Surabaya relatif sebanding dengan jumlah penduduknya satu orang kendaraan per orang atau satu persennya. Sementara pertambahan jalan empat persen saja.

Perhubungan Kota Surabaya menjelaskan bahwa peningkatan volume kendaraan dari luar kota yang keluar-masuk Surabaya disebabkan oleh struktur yang sedang dalam proses pertumbuhan. Hal ini bukan karena bertambahnya jumlah kendaraan yang bertambahnya jumlah kendaraan di Surabaya. Sementara pertambahan jalan empat

mpamaan 3 juta jiwa pada malam hari, tapi s

bertujuan untuk mengurangi kecepatan, tapi kita juga ingin selamat.

Sebelumnya, Surabaya telah membangun berbagai sarana sejumlah akses baru untuk mengurangi kemacetan juga transportasi yang layak. Berbagai infrastruktur juga dibangun pemerintah pemkot Surabaya sendiri. Akses baru yaitu : Bus Botol Bek (Surabaya Suroboyo Bus) Inilah transportasi publik yang modern dan Surabaya. Tidak hanya untuk mengatasi kepadatan lalu lintas transportasi publik, tetapi juga untuk mempercantik jalanan Surabaya. Underpass Mayjen Sungkono Dengan adanya membuat simpang lima untuk menuju kota satelit Surabaya

Sebelumnya, Surabaya telah membangun berbagai akses baru untuk mengurangi kemacetan juga layak. Berbagai infrastruktur juga dibangun per kota Surabaya sendiri. Akses baru yaitu : Bus Bottleneck (Bottleneck Bus) Inilah transportasi publik yang modern Surabaya. Tidak hanya untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, tetapi juga untuk memperlancar transportasi publik, tetapi juga untuk memperlancar Surabaya. Underpass Mayjen Sungkono Dengan adanya simpang lima untuk menuju kota satelit Surabaya

merr diharapkan untuk menjadi solusi untuk mengatasi lalu lintas yaitu kemacetan.³⁰

1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,81 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 3,095,026 (Pada Bulan Januari 2019) yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Kota Surabaya terletak 415 km sebelah barat laut Denpasar Bali dan terletak 796 km sebelah timur Jakarta. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa.

2. Batas-Batas Wilayah

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Selat Madura

3. Visi dan Misi Kota Surabaya

Visi :

Menuju Surabaya Lebih Baik merupakan kata yang memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan semua masyarakat. Perubahan di tengah jumlah penduduk yang terus-terusan

³⁰ www.infosurabaya.ac.id, diakses pada tanggal 8 Desember 2019 pukul 13:13 wib.

yang harus saling diimbangi dengan penguatan struktur e

Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilak
organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tuju
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Wa
memperlihatkan secara jelas tahapan yang paling penting
pembangunan di Kota Surabaya. Adapun misi yang tel
adalah sebagai berikut :

a) Misi membangun kehidupan kota yang lebih CER
peningkatan sumber daya manusia yang di
peningkatan kualitas intelektual, ketrampilan, se

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang paling penting dalam proses pembangunan di Kota Surabaya. Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERMAT melalui peningkatan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan kualitas intelektual, ketrampilan, serta kesejahteraan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
- b) Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAHATI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya manusia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga.
- c) Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERKUALITAS melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

d) Misi menjadikan Kota Surabaya semakin pembangunan infrastruktur fisik dan sosial BERWAWASAN LINGKUNGAN.

4. Kondisi Administratif

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya Kecamatan, 154 Kelurahan, 1368 Rukun Warga Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang terbagi menjadi area pemukiman vertikal baik bertingkat maupun apartemen, area untuk kegiatan jasa dan dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat

4. Kondisi Administratif

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terbagi menjadi 12 Kecamatan, 154 Kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 1368 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang terbagi menjadi area pemukiman vertikal baik perumahan apartemen maupun apartemen, area untuk kegiatan jasa dan perdagangan, dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terbagi menjadi 12 Kecamatan, 154 Kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 13.680 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang terbagi menjadi area pemukiman vertikal baik bertingkat maupun apartemen, area untuk kegiatan jasa dan perdagangan, dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terbagi menjadi 12 Kecamatan, 154 Kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 13.688 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang terbagi menjadi area pemukiman vertikal baik bertingkat maupun apartemen, area untuk kegiatan jasa dan perdagangan, dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat

Pendidikan di Kota Surabaya merupakan penunjang utama dalam proses belajar mengajar sebanyak 25,11% penduduk kota Surabaya berhasil menamatkan sekolahnya dijenjang SMA/MA yang kemudian disusul oleh SD/MI dengan presentase 21,17% dan diperingkat ketiga yakni SMP/MTs sebanyak 19,17%. Jika berbicara tentang pendidikan tentu merupakan aspek paling penting dalam kehidupan, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan tentu akan semakin baik kualitas sumber dayanya.

Sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, sektor transportasi khususnya lalu lintas jalan ditangani oleh DEPARTEMEN WEG VERKEER EN WATER STAAT. Sebagai aturan hukum dan pelaksanaannya tercantum dalam WEG VERKEER ORDONANTIE (WVO), Stat Blad Nomor : 86 Tahun 1933. Pada Tahun 1942 s/d 1945 departemen yang mengatur lalu lintas, tidak berfungsi secara maksimal karena adanya perang kemerdekaan. Pada Tahun 1950, lembaga tersebut diaktifkan kembali dan berada pada DEPARTEMEN LALU LINTAS DAN PENGAIRAN NEGARA. Pada tahun 1957, lahirlah Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah . Atas dasar tersebut terbentuklah DJAWATAN LALU LINTAS

Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan penggabungan dinas yang ada pada masa sebelum otonomi daerah yaitu : (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan), Dinas Terminal dan Dinas Parkir. Dengan adanya Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang merupakan gabungan dari tiga Dinas diatas (Dinas Angkutan, Dinas Terminal, Dinas Parkir). Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya awalnya telah diatur sesuai dengan PERDA Kota Surabaya No. 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, yang kemudian diganti dengan PERDA No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

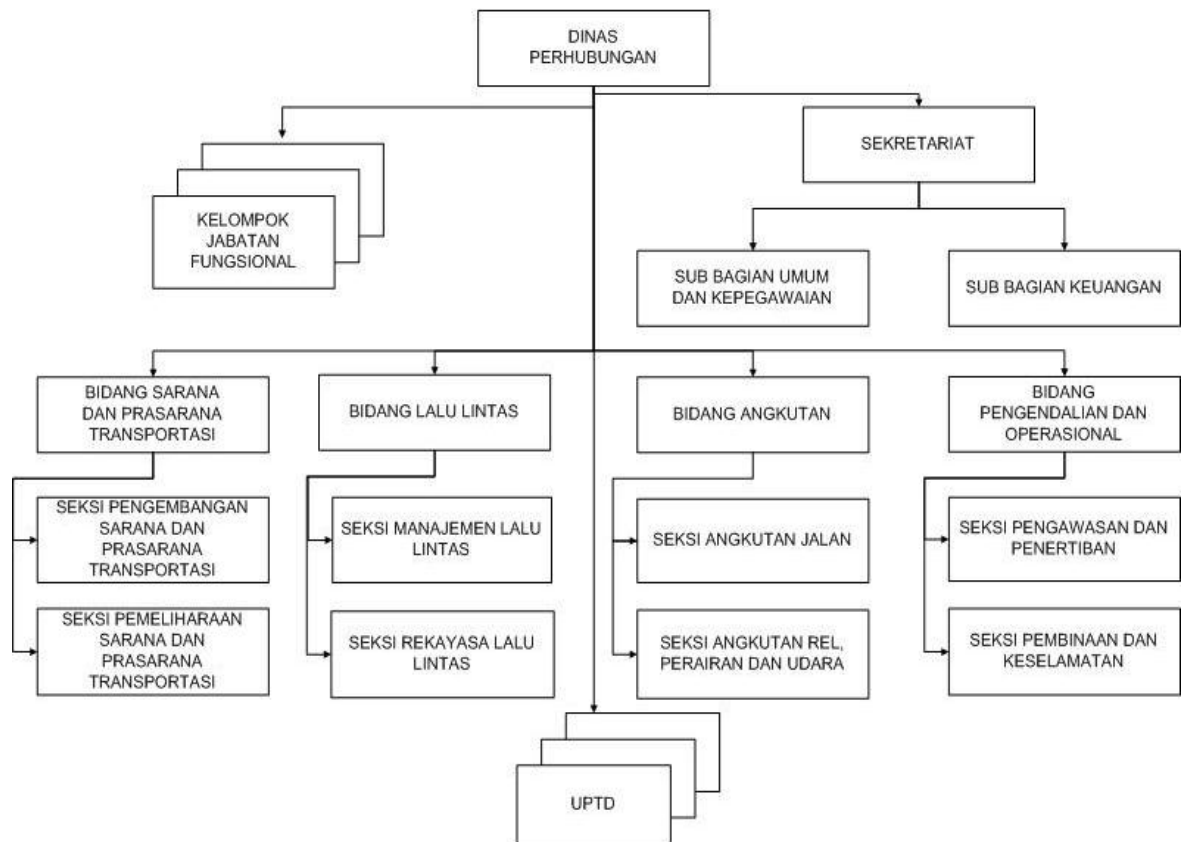
Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya diatur dalam SK Walikota Surabaya No 51 Tahun 2001 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang kemudian diganti dengan PERWALI No. 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Fungsi Dinas Kota Surabaya.³¹ Menurut PERWALI No. 91 Tahun 2008 Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan se-

³¹ www.dishub.surabaya.go.id (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2019, pukul 12:27 wib)

Visi misi Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut: yaitu sistem transportasi yang handal dan terintegrasi bisa terwujud karena adanya visi yang menguatkan dinas perhubungan. Dinas Perhubungan berharap setelah adanya visi dan misi ini menjadikan transportasi yang ada di Surabaya ini berkualitas serta mengutamakan keselamatan bagi penumpangnya dan mampu mengurangi kecelakaan. Dengan meningkatkan kerjasama antar daerah bisa mengembangkan sistem transportasi di kota Surabaya yang terintegrasi yaitu misi yang dibuat oleh dinas perhubungan. Serta dapat menjadikan pelayanan dan penerimaan pendapatan asli daerah terutama di sektor transportasi.³²

[illegible]

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya



Ket : Ada bagian sendiri yang digunakan untuk menangani Unit Suroboyo Bus. Yaitu di bawah bidang angkutan dinas perhubungan kota Surabaya. Dari Dishub kota Surabaya sendiri sudah diatur ada bagian yang memfokuskan

D. Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

FUNGSI

TUGAS

- [illegible]

- yaitu instansi dibawah pemerintah kota Surabaya. Yang dengan fungsi dan tugasnya yakni seputar kebersihan terbuka hijau yang ada di kota Surabaya. Jika pada akhir ditunjuk yang bekerja sama dengan Dishub sebagai melaksanakan operasional suroboyo bus dengan membayar dengan sampah botol plastik yang masyarakat untuk menjaga terhadap lingkungan sekitar.

E. Struktur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

- a) Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.

54

- 3. Seksi Dekorasi Kota;
 - d) Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - e) Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembersihan Jalan dan Pedestrian
 - 2. Seksi Operasional Pengangkutan Sampah dan Alat Berat
 - f) UPTD.
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.³⁴
- F. Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus Berbayar**

1. Program Suroboyo Bus

³⁴ Ibid,

penumpang menjadi 101.976 pada September 2019. Pada Agustus 2019 mencapai 96.620 penumpang. Hal itu berbanding dengan penumpang dari Surabaya Integrated Urban Transport System (SIUTS) penumpang Suroboyo Bus periode Januari – September 2019 mencapai 761.941 penumpang.³⁵

Pada Juni 2019, penumpang transportasi umum mencapai angka 82.486. Angka terus meningkat hingga Juli 2019 mencapai 96.698. Pada Agustus, jumlah penumpang bus yang diangkut sampah plastik ini turun menjadi 92.620. Namun, jumlah penumpang Suroboyo bus meningkat pesat pada September 2019 yang mencapai angka 101.976. Koordinator SIUTS Surabaya Ana

Pada Juni 2019, penumpang transportasi umum angka 82.486. Angka terus meningkat hingga Juli 2019 96.698. Pada Agustus, jumlah penumpang bus yang di sampah plastik ini turun menjadi 92.620. Namun, jumlah Suroboyo bus meningkat pesat pada September 2019 ya angka 101.976. Koordinator SIUTS Surabaya Ana

Pada Juni 2019, penumpang transportasi umum angka 82.486. Angka terus meningkat hingga Juli 2019 96.698. Pada Agustus, jumlah penumpang bus yang di sampah plastik ini turun menjadi 92.620. Namun, jumlah Suroboyo bus meningkat pesat pada September 2019 ya angka 101.976. Koordinator SIUTS Surabaya Ana

³⁵ <https://surabaya.com>, Di akses pada hari ahad tanggal 24 November 2019 pukul 11:00 wib.

Surabaya Bus di sosial media juga mempengaruhi animasi. Terkait hal tersebut, masih belum bisa memastikan penambahan armada atau rute baru. Namun, pihaknya meyakini akan terus mengembangkan fitur dalam aplikasi Gobis.

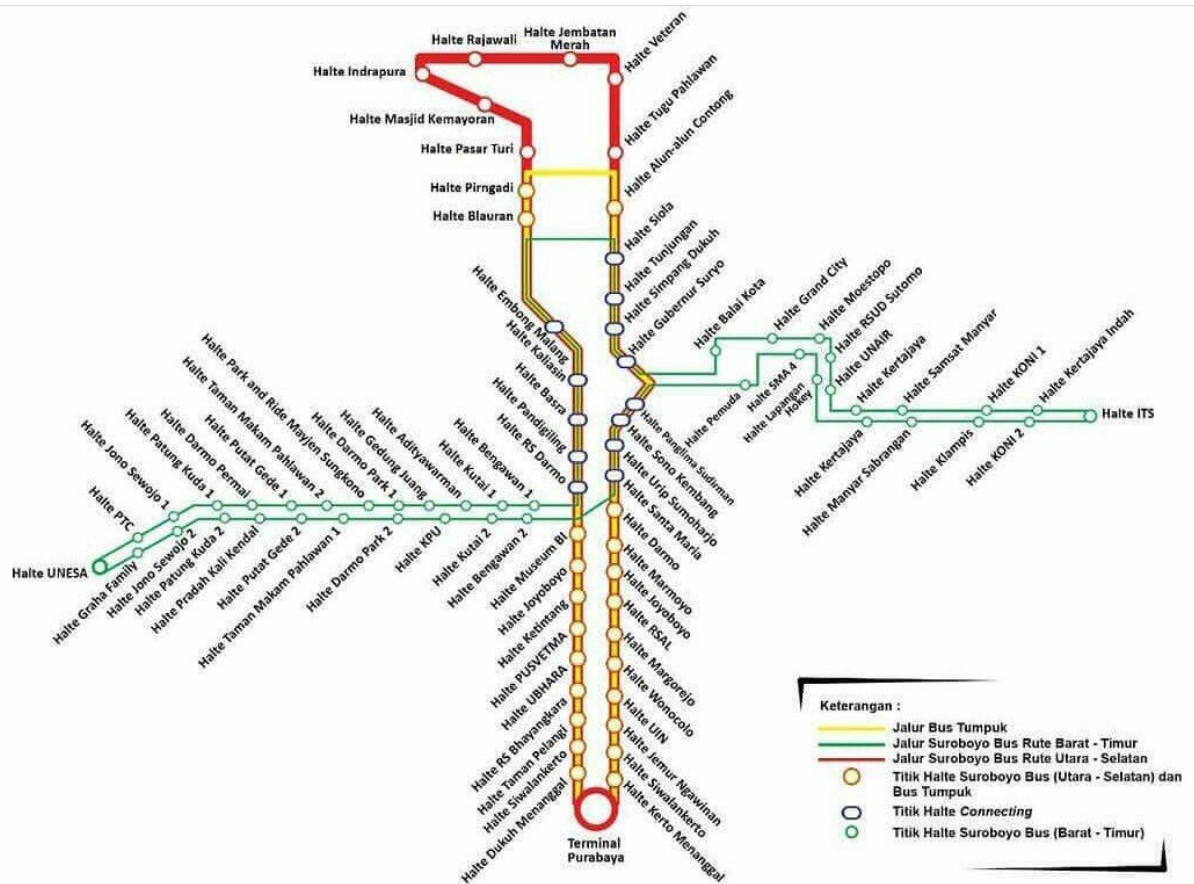
Banyak fitur Gobis yang bisa digunakan penumpang untuk mengakses Surabaya Bus. Fitur "Menunggu di halte" adalah fitur SIUTS agar tidak ada penumpang yang menunggu bus yang terlambat. "Untuk itu, di aplikasi gobis sudah fitur 'menunggu di halte' di mana di tiap halte sudah terdapat QR code. Fitur ini memudahkan crew Surabaya Bus yang terdekat dengan halte untuk tahu jumlah penumpang yang menunggu di halte terdekat."

Banyak fitur Gobis yang bisa digunakan per
mengakses Suroboyo Bus. Fitur “Menunggu di halte” ad
SIUTS agar tidak ada penumpang yang menunggu bus
"Untuk itu, di aplikasi gobis sudah fitur 'menunggu d
mana di tiap halte sudah terdapat QR code. F
memudahkan crew Suroboyo Bus yang terdekat deng
tahu jumlah penumpang yang menunggu di halte terdeka

3. Gambar Rute Suroboyo Bus

Berikut ini gambar rute suroboyo bus Rute Surabaya Utara-selatan mulai dari Terminal Purabaya hingga Halte Rajawali. Begitupun sebaliknya juga Rute Surabaya Barat-Timur mulai dari Halte Unesa hingga Halte ITS.

Gamabr 4.2



Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan dalam hal transportasi publik yaitu suroboyo bus untuk kenyamanan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya sendiri memiliki misi untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang hijau, bebas dari polusi kendaraan dan juga akan kebersihan sampah botol plastik. Jadi Pemerintah Kota Surabaya ingin transportasi publik yaitu suroboyo bus yang bersih, nyaman, aman lingkungan, dan aman serta dapat memberikan wawasan terkait dalam hal sampah botol plastik. Seorang pemimpin di Kota Surabaya memberikan bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat Kota Surabaya terlebih walikota Surabaya secara langsung dalam hal tugas untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam bidang transportasi publik.

Pernyataan tentang suroboyo bus tidak diatur dalam perda hanya ada perwalinya saja. Itu merupakan bentuk pengelolaan pemerintah terhadap kota Surabaya yaitu dengan adanya suroboyo bus yang membayar dengan sampah botol plastik. Dengan dikeluarkan perwali tentang suroboyo bus

Dalam hal ini peneliti ada 2 rumusan masalah yang p
jawab yaitu pertama mengenai implementasi kebijakan trans
suroboyo bus yang kedua mengenai perubahan pengelolaan
plastik sejak adanya suroboyo bus. Sebelum menganalisis
peneliti bisa menilai informan untuk memberikan jawaban te
masalah tersebut yang dijadikan sebagai sumber data. In
dipilih oleh peneliti diharapkan mampu memberikan jawab
tentang kebijakan transportasi publik suroboyo bus berbayar
plastik.

alam menjawab suatu rumusan masalah yaitu

implementasi kebijakan transportasi publik suroboyo bus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengelolaan sampah botol plastik sejak adanya Suroboyo Bus. Jika dilihat dari data tersebut peneliti dapat menjumpai bahwa pengelolaan sampah botol plastik Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Pengguna Suroboyo bus sebagai informan penelitian. Penelitian ini akan memberikan jawaban terkait rumusan masalah tersebut.

1. Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus

Dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan suatu tujuan yang harus ada dalam suatu kebijakan untuk menciptakan suatu kekuasaan dalam menghadapi permasalahan. Publik sendiri yang pada umumnya dapat diartikan sebagai masyarakat yang luas. Sedangkan kebijakan publik sendiri yaitu suatu hal yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan yang di dalamnya sudah tertera kegiatan untuk diterapkan.

Implementasi merupakan hal yang paling sering dijumpai dalam suatu kehidupan juga banyak ahli politik yang memberikan pemikiran terkait implementasi kebijakan. Implementasi bisa diterapkan setelah adanya kebijakan karena proses untuk mengimplementasikan merupakan hal yang tidak, setiap implementasi pasti ada tahap-tahap yang harus dilalui dan itupun berbeda-beda.

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn bahwa dalam proses implementasi meliputi kontrol, perubahan dan kepatuhan untuk bertindak. Suatu implementasi dapat dikaji melalui ketiga konsep tersebut untuk mengetahui pemasalahan yang dihasilkan dalam lingkup untuk mencapai tujuan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan transportasi publik dikatakan berhasil apabila dukungan dari

“Kita nggak ngomong mengurangi kemacetan, kita secara peraturan baik perundang-undangan itu ngomong bahwa pemerintah wajib menyediakan agkutan umum yang layak. Kita menyediakan opsi alternatif bagi masyarakat, yaitu ada opsi baru transportasi seperti ini. Kita menyampaikan dulu plus minusnya kita, golnya adalah mereka berpindah. Kalau udah tau enakunya mereka bisa memilih, orang pastinya memilih yang lebih enak.”³⁸

[illegible]

terutama masyarakat kota Surabaya. Yang dikatakan Dishub Unit Suroboyo Bus dengan Anggota Komisi C Surabaya ada sedikit kesesuaian yaitu tujuan kebijakan memberikan pelayanan terhadap masyarakat kota Surabaya pemerintah harus wajib memberikan fasilitas transportasi terhadap warganya. Temuan dilapangan dengan teori yang ini sudah ada kesesuaian bahwa tujuan adanya kebijakan memberikan modal yang layak untuk masyarakatnya.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Implementator dari transportasi publik suroboyo ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya yaitu Dinas

2. Sumber-sumber Kebijakan

Implementator dari transportasi publik suroboyo bus yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya yaitu Dinas Perhubungan selain itu juga Dinas Kebersihan yang ditunjuk dalam hal pengelolaan sampah botol plastik. Selain itu masyarakat pengguna suroboyo bus juga ikut mendukungnya. Dalam hal kebijakan pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap kebijakan tersebut, karena berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari pelaksanaannya.

Suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari proses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Kebijakan

Dalam hal ini peneliti wawancara dengan Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa :

Untuk mendukung suatu kebijakan transportasi publik suroboyo bus tentunya membutuhkan dana yang cukup banyak dengan satu unit suroboyo bus seharga 2,4 Milyar. Kota Surabaya merupakan kota yang sangat luas dan memiliki banyak penduduk selain dana yang mendukung tetapi peran masyarakat juga harus mendukung suatu kebijakan transportasi publik tersebut terutama dalam menjaga lingkungan dari sampah botol plastik. Karena sampah botol plastik yang ada dikota Surabaya terus menambah setiap harinya, untuk menjaga dari limbah botol plastik maka pemerintah mengeluarkan suroboyo bus dengan dukungan

67

Dalam hal ini peneliti juga wawancara dengan Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya bahwa :

Terutama dalam hal sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam suatu kebijakan. Karena keberhasilan suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dishub Unit Suroboyo Bus bahwa :

Seperti halnya dilapangan yang peneliti amati bahwa sumber kebijakan tidak hanya sumber daya manusia tapi juga berupa dana yang dibutuhkan tetapi juga peran dan dukungan dari masyarakat Surabaya sendiri. Yang menghambat dalam transportasi suroboyo

⁴¹ Pak Franki selaku Dishub Kepala Unit Suroboyo Bus, wawancara, pada tanggal 19 November 2019, pukul 13:00 wib.

untuk menganalisis bahwa manusia juga dapat dikategorikan sebagai sumber yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Ciri-ciri agen pelaksana disini meliputi perhatian, kemampuan, dan motivasi yang ikut berperan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Dalam hal ini kebijakan publik sangat penting karena kinerja implementasi suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaannya.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dishub Unit Kerja Sama Masyarakat bahwa: uang tidak dengan botol plastik, jumlah armada

Ciri-ciri agen pelaksana disini meliputi perhatian dari pihak yang ikut berperan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Dalam hal ini kebijakan publik sangat penting karena kinerja implementasi suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaannya.

“ masih banyak masyarakat yang ingin membayar dengan yang sangat terbatas jadi waktu tunggu semakin lam, masih ada pihak yang menyalahgunakan tiket suroboyo bus untuk mendapatkan keuntungan.”⁴²

Dishub Kepala Unit Suroboyo Bus, wawancara, pada tanggal 19 November 2019,

Antara Dinas Perhubungan, dan Komisi C Anggota DPRD Kota Surabaya saling berkomunikasi satu sama lain untuk membahas mengenai transportasi publik suroboyo bus.

“Mungkin tahun depan untuk menambah lagi, tidak ada yang tidak mungkin dikota ini. Semuanya masih serba mungkin mangkanya perlu kreatifitas perlu penelitian dan perlu dukungan masyarakat, selalu kita mendukung apa inovasinya masyarakat, apa inovasinya dinas, apa inovasinya walikota kita dukung terus makanya taka da yang tak mungkin.”⁴⁶

[illegible]

Peneliti juga wawancara dengan pengguna surobopo mengatakan bahwa :

“semua masyarakat Surabaya sudah ke bus ini dan mereka juga memilih ikut tr karena irit biaya juga ramah lingkungan mengumpulkan botol-botol untuk di daur tidak sekedar dibuang saja”⁴⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Anggota DPRD Kota Surabaya bahwa :

“Yaitu tadi sekarang masyarakat ada la mau dengan transportasi bus karena di a di anggap pelan dan tidak bisa menyelesa Kan sekarang banyak masyarakat yang kalau ingin cepat ya solusinya pakek ke lebih cepat yaitu sepeda motor, tapi kalau

“semua masyarakat Surabaya sudah kenal suroboyobus ini dan mereka juga memilih ikut transportasi ini karena irit biaya juga ramah lingkungan mereka juga mengumpulkan botol-botol untuk di daur ulang kembali tidak sekedar dibuang saja”⁴⁹

“Yaitu tadi sekarang masyarakat ada lah yang tidak mau dengan transportasi bus karena di anggap lambat di anggap pelan dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kan sekarang banyak masyarakat yang ingin cepat kalau ingin cepat ya solusinya pakek kendaraan yang lebih cepat yaitu sepeda motor, tapi kalau sepeda motor terus dibiarkan kan otomatis polusi otomatis mengganggu jalan juga karena macet juga kecelakaan, masyarakatnya tidak sehat. Ya itu solusinya harus di hadang transportasi massal yang juga menjangkau daerah-daerah tertentu, sementara itu pemerintah mengeluarkan suroboyo bus dengan berbagai koridor

⁴⁹ Ana, Pengguna Suroboyo Bus, Wawancara pada tanggal 21 November 2019, pukul 10:00 wib

disimpulkan yang ada dalam teori implementasi kebijakan dan Van Horn dengan paparan diatas masih belum dapat mengatasi permasalahan seperti yang dikatakan dishub.

6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan Politik

Lingkungan terutama yang ada dikota Surabaya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan transportasi suroboyo bus. Dari hal ekonomi kota Surabaya terhambat yaitu regulasi finansial.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dishub Unit Suroboyo bahwa :

“Dalam hal ekonomi yang menghambat

Lingkungan terutama yang ada dikota Surabaya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan transportasi suroboyo bus. Dari hal ekonomi kota Surabaya terhambat yaitu regulasi finansial.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dishub Unit Surabaya bahwa :

“Dalam hal ekonomi yang menghambat

Lingkungan terutama yang ada dikota Surabaya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan transportasi suroboyo bus. Dari hal ekonomi kota Surabaya terhambat yaitu regulasi finansial.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dishub Unit Surabaya bahwa :

“Dalam hal ekonomi yang menghambat

Lingkungan terutama yang ada dikota Surabaya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan transportasi suroboyo bus. Dari hal ekonomi kota Surabaya terhambat yaitu regulasi finansial.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dishub Unit Surabaya bahwa :

“Dalam hal ekonomi yang menghambat

Lingkungan terutama yang ada dikota Surabaya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan transportasi suroboyo bus. Dari hal ekonomi kota Surabaya terhambat yaitu regulasi finansial.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dishub Unit Surabaya bahwa :

“Dalam hal ekonomi yang menghambat

“Dalam hal ekonomi yang menghambat regulasi kondisi finansial kita, Surabaya kota tidak seperti dijakarta yang kaya pro banyak.”⁵¹

⁵⁰ Pak Buchori Imron selaku Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, wawancara, pada tanggal 28 November 2019, pukul 11:30 wib.

⁵¹ Pak Franki selaku Dishub Kepala Unit Suroboyo Bus, wawancara, pada tanggal 19 November 2019, pukul 13:00 wib.

keramahan dari crew suroboyo bus tersebut.

Peneliti juga wawancara dengan pengguna suroboyo

“ada sih mbk, salah satu dari crew suroboyo kurang ramah, jarang senyum kalau ditanyanya jawabannya cuek saja. Itu kan gak penumpang. Juga kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang penggunaannya.”⁵²

Kalau dilihat dalam segi politiknya, orien mengoperasikan program kebijakan transportasi pu bus masih perlu untuk diperhatikan dan butuh ko kuat

“ada sih mbk, salah satu dari crew suroboyo bus yang kurang ramah, jarang senyum kalau ditanyai masyarakat ya jawabannya cuek saja. Itu kan gak nyaman bagi penumpang. Juga kurangnya sosialisasi suroboyo bus terhadap masyarakat yang kurang tau cara penggunaannya.”⁵²

Seperti yang dikatakan oleh Dishub Unit Suroboyo Bus bahwa :

⁵² Nadia, Pengguna Suroboyo Bus, Wawancara pada tanggal 13 November 2019, pukul 16:00 wib

77

sesuai. Karena masih ada yang harus disempurnakan untuk tujuan yang diinginkan. Karena lingkungan tersebut turut keberhasilan suatu kebijakan.

2. Perubahan Pengelolaan Sampah Plastik Se Suroboyo Bus Yang Membayar Dengan Sampah Plastik

Suroboyo Bus merupakan transportasi yang desa transportasi yang ada di Negara-negara maju. Merupakan transportasi publik yang ada di Indonesia yang menggunakan sampah botol plastik. Suroboyo diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Tri Rism

Suroboyo Bus Yang Membayar Dengan Sampah Botol Plastik

Suroboyo Bus merupakan transportasi yang desainnya meniru transportasi yang ada di Negara-negara maju. Merupakan salah satu transportasi publik yang ada di Indonesia yang membayarnya menggunakan sampah botol plastik. Suroboyo bus tersebut diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Tri Rismaharini tepat tanggal 7 April 2018 di gedung Siola. Dengan pembayaran naik bus ini yang sangat unik yaitu dengan botol plastik. Adanya suroboyo bus ini dimaksudkan untuk mengurangi sampah plastik yang menjadi permasalahan dalam hal lingkungan. Sampah plastik yang dibayar akan dikumpulkan lalu disetorkan ke bank sampah. Sampah yang terkumpul dijual untuk didaur ulang menjadi bahan yang lebih bermanfaat.

secara pelaksanaan, tepat secara target, tepat secara linier, dan tepat secara proses.

1. Tepat Sesuai Masalah

Peneliti sendiri mengidentifikasi bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi bus ini dikatakan tepat sesuai masalah. Untuk itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan transportasi publik yang tepat sesuai masalah memang karena masyarakat sendiri butuh akses transportasi yang bersih, nyaman dan aman untuk menunjang aktivitasnya juga dengan fasilitas yang memadai. Karena masalah yang dihadapi bus ini perlu untuk menjaga lingkungannya masing-masing agar bus ini pemerintah yang melakukan kerjasama dengan masyarakat.

Peneliti sendiri mengidentifikasi bahwa adanya suroboyobus ini dikatakan tepat sesuai masalah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan transportasi publik suroboyobus memang karena masyarakat sendiri butuh akan hadirnya transportasi yang bersih, nyaman dan aman pula dilengkapi juga dengan fasilitas yang memadai. Karena masyarakat juga perlu untuk menjaga lingkungannya masing-masing, dalam hal ini pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas kebersihan Ruang Terbuka Hijau untuk membayar menggunakan sampah botol plastik.

“Kalau dari kita sendiri yang menilai ya ada perubahan sih mbk, yang dulunya banyak botol-botol berserakan dijalan di depan sekolah-sekolah tapi sekarang

Peneliti juga wawancara Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya beliau mengatakan bahwa :

Seperti halnya yang dikatakan oleh pengguna suroboyo bus bahwa:

Dengan dikeluarkan suroboyo bus tersebut, Pemerintah menjadi pengelola dari kebijakan tersebut dan Dinas

⁵⁶ Ana, Pengguna Suroboyo Bus, Wawancara pada tanggal 21 November 2019, pukul 10:00 wib

Peneliti juga wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Kesehatan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Maros yang mengatakan

“Seng aslie akeh sampah botol ng pinggir jalan. Mulai ada perubahan mbk, sampah plastik dikumpulkan untuk terurai mbk jadi kalau bisa ya mengurangi penggunaan botol plastik”

Penulis sendiri melihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa antara Pemerintah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan saling bekerja sama untuk dapat meningkatkan transportasi yang layak bagi masyarakat khususnya terutama dalam hal membayar dengan sampah. Dalam hal tersebut masuk dalam tepat secara pelaksanaan.

“Seng aslie akeh sampah botol ng pinggir jalan, saiki mulai ada perubahan mbk, sampah plastik iku sulit untuk terurai mbk jadi kalau bisa ya kurangi lah penggunaan botol plastik”

3. Tepat Secara Target

83

Peneliti dapat mengetahui dengan lingkungan. Konsep Riant Nugroho yang peneliti yang pertama lingkungan kebijakan yang di dal antara perumusan kebijakan dengan pelaksan Kedua yaitu lingkungan eksternal yang didalam pihak yang saling mendukung secara tepat Sedangkan di internal melihat data yang pen bahwa adanya suroboyo bus ada komunikasi d pihak yang terkait yaitu Dinas Perhubungan. sendiri memaknai sesuai dengan pelaksanaan masing.. Lingkungan yang ada dikota Surabaya

Peneliti dapat mengetahui dengan

eksternal. Karena sudah ada timbal balik dari masyarakat yang menggunakan transportasi publik suroboyo mengalami peningkatan terhadap penumpang suroboyo. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa :

“Banyak sekali mbk, masyarakat yang membawa botol plastik untuk menaiki suroboyo. Hari ini saja penumpang suroboyo bukannya sedikit apalagi hari weekend banyak anak-anak yang berkeliling untuk liburan. Tapi kalau di hari yang lain masih kurang tau itu.”

“Banyak sekali mbk, masyarakat yang menggunakan botol plastik untuk menaiki suroboyo bus. Setiap harinya saja penumpang suroboyo bus bertambah, apalagi hari weekend banyak anak-anak kecil yang berkeliling untuk liburan. Tapi kalau untuk keperluan yang lain masih kurang tau itu.”

⁵⁸ Pak Buchori Imron selaku Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, wawancara, pada tanggal 28 November 2019, pukul 11:30 wib.

[illegible]

merespon dengan dikeluarkan suroboyo bus yang aman bagi penggunaanya. Dapat di ketahui suroboyo bus ini mamapu memberikan perubahan Surabaya dalam hal sampah botol plastik.

5. Tepat Secara Proses

Ada 3 hal yang meliputi tepat secara diantaranya yang pertama *policy acceptance* (kebijakan). Dapat dipahami bahwa kebijakan disiplin aturan main yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat akan datang, pemerintah sendiri memahami bahwa

Ada 3 hal yang meliputi tepat secara proses yaitu diantaranya yang pertama *policy acceptance* (penerima kebijakan). Dapat dipahami bahwa kebijakan disini merupakan aturan main yang sangat dibutuhkan untuk masa depan yang akan datang, pemerintah sendiri memahami bahwa kebijakan merupakan tugas yang harus tetap dilaksanakan. Kedua yaitu *policy adaption* (adopsi kebijakan). Dapat dipahami juga bahwa kebijakan merupakan aturan main yang dibutuhkan untuk masa depan, pemerintah sebagai penerima kebijakan yang harus tetap dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu *stategis readiness* (pelaksana kebijakan). Di sisi lain publik siap melaksanakan dan menjadi bagian dari birokrat. Dimana

yang sudah ditentukan seperti yang diamati
dilapangan.

Peneliti juga wewawancarai pengguna suroboyo bus

“ masyarakat membawa botol untuk suroboyo bus, banyak yang tidak sesuai yang ditentukan. Padahal ukuran botol yang ditentukan dari 240ml, 600 ml, dan ukuran botol yang ditentukan setengah liter. Tapi masyarakat tetap membawa apa yg ditentukan, seolah orang lain tidak ditemui ya yang dibawa.”⁶⁰

Disisi lain sebagai *policy adaption* yaitu

yang ditunjuk sebagai penerima kebijakan yang

“ masyarakat membawa botol untuk membayar suroboyo bus, banyak yang tidak sesuai dengan yang ditentukan. Padahal ukuran botol yang dibawa mulai dari 240ml, 600 ml, dan ukuran botol yang berisi satu setengah liter. Tapi masyarakat tersebut tidak membawa apa yg ditentukan, seolah olah apa yang ditemui ya yang dibawa.”⁶⁰

dilakukan pemilahan sek. Pemilahan s plastik dilakukan di TPS 3R Osowilangun dilakukan pemilahan juga menunggu ban palstik yang terkumpul dulu. Dulu sebelu perwali tentang suroboyo bus sampah bo disimpan ng bank-bank sampah sen suroboyo, di juga disimpan dirumah-r Tapi sak wis e onok perwalie tentang sampah botol plastik dikelola oleh din kemudian dilakukan pemilahan oleh din sampah seng terkumpul dan wes cle dilelang melalui pihak Direktorat Jende Negara.”⁶¹

dilakukan pemilahan sek. Pemilahan s plastik dilakukan di TPS 3R Osowilangun dilakukan pemilahan juga menunggu ban palstik yang terkumpul dulu. Dulu sebelu perwali tentang suroboyo bus sampah bo disimpan ng bank-bank sampah sen suroboyo, di juga disimpan dirumah-r Tapi sak wis e onok perwalie tentang sampah botol plastik dikelola oleh din kemudian dilakukan pemilahan oleh din sampah seng terkumpul dan wes cle dilelang melalui pihak Direktorat Jende Negara.”⁶¹

dilakukan pemilahan sek. Pemilahan s plastik dilakukan di TPS 3R Osowilangun dilakukan pemilahan juga menunggu ban palstik yang terkumpul dulu. Dulu sebelu perwali tentang suroboyo bus sampah bo disimpan ng bank-bank sampah sen suroboyo, di juga disimpan dirumah-r Tapi sak wis e onok perwalie tentang sampah botol plastik dikelola oleh din kemudian dilakukan pemilahan oleh din sampah seng terkumpul dan wes cle dilelang melalui pihak Direktorat Jende Negara.”⁶¹

dilakukan pemilahan sek. Pemilahan s plastik dilakukan di TPS 3R Osowilangun dilakukan pemilahan juga menunggu ban palstik yang terkumpul dulu. Dulu sebelu perwali tentang suroboyo bus sampah bo disimpan ng bank-bank sampah sen suroboyo, di juga disimpan dirumah-r Tapi sak wis e onok perwalie tentang sampah botol plastik dikelola oleh din kemudian dilakukan pemilahan oleh din sampah seng terkumpul dan wes cle dilelang melalui pihak Direktorat Jende Negara.”⁶¹

menjadi pelaksana suroboyo bus dengan menu
Perhubungan dan Dinas Kebersihan untuk terli
transportasi publik suroboyo bus.

PENUTUP

- Berdasarkan data yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti bisa mengetahui bahwa implementasi kebijakan transportasi publik suroboyo bus belum dapat dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang ingin membayar dengan uang tidak dengan sampah botol plastik, sampah botol plastik yang digunakan untuk membayar suroboyo bus tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam perwali, masih ada masyarakat yang menyalahgunakan tiket suroboyo bus juga kurangnya sosialisasi pihak pelaksana terhadap masyarakat.
- Pengelolaan sampah botol plastik di kota Surabaya mengalami perubahan yaitu dengan berkurangnya sampah botol plastik yang ada dijalanan, tidak seperti dulu sebelum adanya suroboyo bus yang masih berserakan di setiap jalanan. Sebelum dikeluarkan perwali suroboyo bus tentang kontribusi sampah, botol plastik tersebut di simpan di bank-bank sampah dan juga di rumah kompos yang ada di Surabaya. Setelah dikeluarkan perwali pihak Dinas Kebersihan ditunjuk untuk mengelola sampah botol plastik. Sampah botol plastik tersebut dilakukan pemilahan untuk membedakan ukuran botol, dan warna

bus sampah botol plastik dapat dimanfaatkan untuk suroboyo bus untuk berkeliling kota dan itu juga salah satu masyarakat kota Surabaya bisa menjaga kebersihan lingkungan. Botol plastik juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang membuang sampah botol plastik sembarangan.

Saran

Sebagai wujud dari Pemerintah Kota Surabaya dengan transportasi publik merupakan suatu yang sangat diperbincangkan di Surabaya. Karena, kota Surabaya sebagai kota yang besar baik dari

B. Saran

Sebagai wujud dari Pemerintah Kota Surabaya dengan adanya transportasi publik merupakan suatu yang sangat diperbincangkan di Kota Surabaya. Karena, kota Surabaya sebagai kota yang besar baik dari penduduk maupun luas wilayahnya serta keadaan sosial dan ekonominya. Yang tidak diragukan lagi dalam hal kemacetan yang sangat padat, seperti halnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Maka, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengikuti perkembangan transportasi publik untuk dapat mengambil penelitian terutama dalam bidang transportasi.

Hal ini, dapat dimanfaatkan terutama dalam hal mengenai kebijakan transportasi publik. Terutama dalam kebijakan yang membayar dengan

, 2011).

Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Alfabeta, 2013)

Ang. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 1996)

Humaidi, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Vol 3*, No. 1, Juni 2013.

Yahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

Prinsip “ *Evaluasi Program TransiJakarta dalam*

- , 2011).
- Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Alfabeta, 2013)
- Ang. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 1996)
- Humaidi, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Vol 3*, No. 1, Juni 2013.
- Yahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Prinsip “ *Evaluasi Program TransiJakarta dalam*

Suci Ramadhani Siregar, Wardaya dan Darmawan Ta'san. *Implementasi Kebijakan Transportasi Publik dalam Mengatasi Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas di Medan*. Jurnal Manajemen dan Logistik, Vol, 04 No, 02 Juli 2017. ISSN: 2355-4721

Soesilo, Nining I. (1999). *Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota*. Jakarta.
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Cianjur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2 No.2, Oktober 2016.
ISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674, Hal 336

[illegible]

Muhammad Tri Ramdhani dan Siti Ramlah. *problematika pembelajaran pendidikan agama islam sdn telangkah desa hampalit kabupaten katingan*. Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015

Utami, Heriani Putri. 2015. *Implementasi kebijakan trayek angkutan kota*. (Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang)

Susantoro, Bambang dan Danng Parikesit, “ *1-2-3 Langkah: Langkah Kecil yang kita Lakukan Menuju Transportasi yang Berkelanjutan*”. Majalah Transportasi Indonesia, Vol 1, Jakarta 2004:89-95

Anugrah Ary Kurniawan dan Indah Prabawati. 2018. *Implementasi Suroboyo di Dinas Perhubungan Kota Surabaya*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Zuhri Muhlis dan Wahyu Herijanto, “ *Manajemen Lalu Lintas Trem di Jalan Raya Darmo*” Jurnal Teknik Pornits Vol. 3 No. 1 (2014) ISSN : 2337:3539 (2301-9721)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

M, Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan : Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2015)

Website :

